



Nomor SP-5/2026

**PERKUAT PENEGAKAN HUKUM PAJAK, DJP DAN BARESKRIM POLRI  
PERBARUI PERJANJIAN KERJA SAMA**

**Jakarta, 5 Februari 2026** – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisar Jenderal Polisi Syahardiantono menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 3 Februari 2026 bertempat di Kantor Kepala Bareskrim Polri. PKS ini merupakan pembaruan dari PKS lama yang berakhir pada 19 Juni 2024.

“Sepanjang berlakunya PKS lama (2021 s.d. 2024), kolaborasi DJP dengan Bareskrim Polri sukses mengamankan penerimaan pajak sekitar **Rp2,8 triliun**,” ungkap Bimo. Secara rinci berdasarkan data internal DJP sepanjang tahun 2021 s.d. 2024, total penerimaan negara tersebut diperoleh dari kegiatan pemblokiran dan penyitaan mencapai sebesar **Rp2,65 triliun** dan dari penghentian penyidikan mencapai sebesar **Rp229,55 miliar**. Kolaborasi ini juga telah menangani berkas perkara hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) sebanyak **366 berkas**, penyitaan dan pemblokiran sebanyak **252 kegiatan**, koordinasi dalam rangka penghentian penyidikan sebanyak **76 perkara**, dan koordinasi dalam rangka pelimpahan tersangka dan barang bukti sebanyak **355 berkas**.

Bimo juga menjelaskan dalam penandatanganan PKS baru ini, DJP dan Bareskrim telah menyepakati 6 ruang lingkup perjanjian yang meliputi: 1) pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, 2) penegakan hukum di bidang perpajakan, 3) asistensi dalam penanganan perkara, 4) penanganan bersama atas tindak pidana penipuan mengatasnamakan DJP, 5) peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, dan 6) pemanfaatan sarana dan prasarana.

“Sebagai langkah nyata menjaga kepercayaan publik, telah disepakati pula penanganan tindak penipuan yang mengatasnamakan DJP,” tambah Bimo.

DJP mencatat sepanjang tahun 2024 s.d. 2025, jumlah interaksi terkait penipuan pajak mengatasnamakan DJP yang disampaikan pada kanal pengaduan mengalami peningkatan dari 1.672 pengaduan pada 2024 menjadi 2.010 pengaduan pada 2025 atau meningkat sekitar 20,2%.



“Dengan disahkannya PKS ini menjadi payung penerapan *multidoor approach* dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pencapaian penerimaan pajak.”  
pungkas Bimo menutup sambutannya

**Narahubung Media:** \_\_\_\_\_

Rosmauli  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pajak

☎ 021 – 5250208  
✉ [humas@pajak.go.id](mailto:humas@pajak.go.id)